Peta Pergeseran Sektor Ekonomi di Tujuh Kabupaten/Kota Kepulauan Riau Tahun 2021–2025

Muhammad Daffa Ferdiansyah[1], Arivina Ratih Yuliahar Taher[2]
Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, Bandar Lampung[1,2]
Daffa02.ferdian@gmail.com[1*], arivina.ratih@feb.unila.ac.id[2]

Abstract
Purpose: This study examines variations in economic conditions, structural transformation, and sectoral specialization across seven regencies and cities in Kepulauan Riau Province over the 2021–2025 period.
Methodology/approach: The research is descriptive and quantitative. It uses constant-price gross regional domestic product (GRDP) by 17 industries, growth rates, and per capita GRDP from Statistics Indonesia, processed in Microsoft Excel. Klassen Typology groups the regions by growth and income, the Structural Change Index (SCI) measures changes in sectoral shares, and the Location Quotient (LQ), with the province as the reference, identifies base sectors. Each tool is reported separately.
Results/findings: The Klassen typology places Bintan and Batam in Quadrant I, Natuna and Kepulauan Anambas in Quadrant II, and Karimun, Lingga, and Tanjungpinang in Quadrant IV, while Quadrant III contains no regions. Bintan exhibits the most substantial structural transformation, marked by a growing contribution from manufacturing and its emergence as a base sector during the observation period. In Tanjungpinang, structural changes are primarily reflected in a reduced share of construction alongside an expanding trade sector. Meanwhile, mining continues to dominate the economic structures of Natuna and Kepulauan Anambas. These results demonstrate that economic growth patterns, structural transformation, and sectoral specialization vary across regencies and cities in the Riau Islands Province.
Limitations: The period is short, SCI compares only two years, and 17-industry aggregates cannot reveal causes or sub-sector movements.
Contribution: The paper offers regional planners a tool-by-tool reading of an archipelagic province that can be replicated in a spreadsheet.

Keywords: *Klassen typology, structural change index, location quotient, sectoral shift, Kepulauan Riau*

1. Pendahuluan

Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mencatat pertumbuhan yang semakin kuat menjelang akhir periode 2021–2025. Menurut Badan Pusat Statistik (2026), laju pertumbuhan ekonomi Kepri mencapai 6,94% pada 2025, lebih tinggi dibandingkan dengan 5,02% pada tahun sebelumnya. Capaian tersebut juga menempatkan Kepri pada posisi teratas di antara provinsi-provinsi di Sumatera pada 2025 (Badan Pusat Statistik, 2026). Pada triwulan II 2025, pertumbuhan ekonomi Kepri termasuk tiga tertinggi di tingkat nasional (Bank Indonesia, 2025). Kendati demikian, capaian agregat provinsi belum cukup untuk menjelaskan bagaimana perekonomian berkembang di setiap kabupaten/kota. Pada 2025, misalnya, pertumbuhan ekonomi Tanjungpinang tercatat 3,31%, sedangkan Natuna mencapai 10,49% dan Kepulauan Anambas sebesar 15,54%. Di Tanjungpinang, nilai PDRB sektor konstruksi atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 juga berubah dari Rp4.401,93 miliar pada 2021 menjadi Rp4.273,78 miliar pada 2025. Angka-angka tersebut memperlihatkan adanya variasi kinerja ekonomi antardaerah yang perlu ditelaah lebih lanjut.

Perbedaan capaian ekonomi tersebut perlu dilihat bersama dengan karakteristik kegiatan produksi yang membentuk perekonomian masing-masing daerah. Natuna dan Kepulauan Anambas, misalnya, memiliki struktur ekonomi dengan kontribusi pertambangan yang besar, sedangkan Bintan mengalami peningkatan pangsa industri pengolahan dalam PDRB. Di Bintan, kontribusi industri pengolahan naik

dari 40,10% pada 2021 menjadi 44,94% pada 2025 (Badan Pusat Statistik, 2026, diolah penulis). Perbedaan susunan kegiatan ekonomi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kepri berlangsung dalam kondisi sektoral yang tidak seragam. Karena itu, penilaian terhadap perkembangan ekonomi daerah perlu mencakup laju pertumbuhan sekaligus perubahan peran berbagai sektor dalam pembentukan PDRB.

Porsi suatu sektor dalam PDRB menggambarkan besarnya sektor itu, tetapi tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa sektor tersebut unggul dibandingkan daerah lain. Dhora et al. (2022), misalnya, menelaah industri pengolahan di Sumatera Selatan, yang menyumbang 19,72 persen PDRB provinsi itu pada 2020, untuk mengidentifikasi subsektor unggulan di dalamnya. Hal serupa relevan bagi Kepri, karena industri pengolahan di provinsi ini juga berperan besar tetapi tidak merata antardaerah.

Salah satu perkembangan industri yang relevan dalam konteks tersebut adalah pengolahan bauksit di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang, Kabupaten Bintan. Kawasan ini mulai beroperasi pada 8 Desember 2018, sementara produksi dan ekspor perdana *Smelter Grade Alumina* (SGA) berlangsung pada 2021. Perkembangan berikutnya terlihat pada 2022, ketika ekspor SGA dari kawasan tersebut dilaporkan mencapai 530.000 ton dengan nilai sekitar Rp2,6 triliun (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022). Pada rentang pengamatan yang sama, pangsa industri pengolahan dalam PDRB Bintan juga meningkat. Informasi ini memberikan gambaran mengenai perkembangan aktivitas pengolahan bauksit di Kepri dan relevansinya untuk dikaji dalam konteks perubahan ekonomi daerah. Namun, kesamaan waktu antara perkembangan industri dan perubahan indikator ekonomi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa aktivitas hilirisasi menjadi penyebab perubahan tersebut.

Keberadaan kawasan ekonomi khusus (KEK) juga menjadi salah satu aspek yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi wilayah di Kepulauan Riau. Hudani et al. (2025) mengkaji hubungan antara keberadaan KEK dan pertumbuhan ekonomi pada tingkat kabupaten/kota serta menemukan bahwa daerah yang memiliki KEK mengalami pertumbuhan rata-rata 0,135 poin persentase lebih tinggi setelah kawasan tersebut beroperasi. Temuan tersebut memberikan gambaran mengenai keterkaitan pengembangan kawasan ekonomi khusus dengan dinamika pertumbuhan ekonomi antardaerah di Kepulauan Riau.

Perkembangan ekonomi wilayah tidak hanya tercermin dalam peningkatan output, tetapi juga dapat diamati melalui perubahan komposisi sektor pembentuk PDRB. Chenery dan Syrquin (1975) menguraikan transformasi struktural sebagai bagian dari proses pembangunan yang melibatkan pergeseran susunan kegiatan ekonomi. Kajian Hasna Tazkiya et al. (2025), dan Junaedi et al. (2026) turut membahas perubahan struktur ekonomi dalam kaitannya dengan perkembangan wilayah. Sementara itu, Sen (2019) menekankan pentingnya memahami variasi kondisi ekonomi antardaerah dalam proses pembangunan. Kerangka tersebut relevan untuk Kepulauan Riau karena tiap kabupaten/kota memiliki skala ekonomi dan komposisi sektor yang berbeda, sehingga perubahan ekonomi provinsi tidak selalu menggambarkan pola perkembangan pada tingkat lokal.

Kesenjangan skala ekonomi di Kepri tampak dari perbandingan nilai PDRB antardaerah. Pada 2025, PDRB Batam mencapai Rp144.674,74 miliar, atau lebih dari separuh total PDRB Kepri yang tercatat Rp224.504,72 miliar. Sebaliknya, PDRB Kabupaten Lingga pada tahun yang sama sebesar Rp3.475,95 miliar (Badan Pusat Statistik, 2026). Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa kontribusi kabupaten/kota terhadap perekonomian provinsi tidak seimbang. Di samping itu, bentuk geografis Kepri sebagai wilayah kepulauan menjadi konteks tambahan dalam memahami hubungan dan perkembangan ekonomi antardaerah. Briguglio (1995) membahas kerentanan ekonomi yang berkaitan dengan karakteristik wilayah kepulauan, sedangkan Wahyuntari & Pujiati (2018) serta Teyansyah et al. (2026) menelaah persoalan ekonomi wilayah dan pembangunan daerah. Ciptawaty (2021)

memetakan keterkaitan PDRB antarwilayah pada kabupaten/kota di lima provinsi Sumatera bagian selatan selama 2015–2019.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji pertumbuhan ekonomi, struktur sektoral, serta potensi ekonomi daerah dengan unit analisis dan metode yang beragam. Andriansyah et al. (2023) menganalisis 30 provinsi di Indonesia selama 2005–2018 dengan pendekatan pertumbuhan regional dan perubahan struktur ekonomi. Dalam penelitian tersebut, Kepri digabungkan dengan Riau karena data Kepri baru tersedia mulai 2006. Pada tingkat kota, Pascal (2023) menerapkan *Location Quotient* (LQ), *Dynamic Location Quotient* (DLQ), dan *Shift-Share* untuk mengkaji sektor ekonomi Batam, sedangkan Anshori & Fahrati (2025) meneliti sektor ekonomi di Kabupaten Tanah Laut. Elisabeth et al. (2025) menggunakan Tipologi Klassen untuk mengelompokkan kondisi ekonomi wilayah di Bangka Belitung. Kajian-kajian tersebut menyediakan landasan untuk menganalisis perekonomian daerah, tetapi memiliki cakupan wilayah, rentang waktu, maupun fokus analisis yang berbeda. Pada tingkat kabupaten, Ananta et al. (2024) mengidentifikasi sektor ekonomi unggulan, prospektif, dan berdaya saing di Kabupaten Pringsewu. Kajian-kajian tersebut menyediakan landasan untuk menganalisis perekonomian daerah, tetapi memiliki cakupan wilayah, rentang waktu, maupun fokus analisis yang berbeda.

Penelitian terdahulu memberi dasar yang kuat, tetapi masing-masing menjawab sebagian dari persoalan ini. Andriansyah et al. (2023) mengukur perubahan struktur pada tingkat provinsi, dan Kepri di dalamnya digabungkan dengan Riau. Pascal (2023) serta Anshori dan Fahrati (2025) mengidentifikasi sektor unggulan pada satu kota atau satu kabupaten. Elisabeth et al. (2025) mengelompokkan kabupaten/kota di Bangka Belitung dengan Tipologi Klassen, tetapi metode yang dilaporkan tidak mengukur besarnya perubahan komposisi sektor. Dengan demikian, klasifikasi pertumbuhan dan pendapatan, intensitas transformasi sektoral, dan spesialisasi wilayah belum dibaca bersamaan untuk kabupaten/kota di Kepri. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan memadukan tiga ukuran. Tipologi Klassen menempatkan setiap daerah menurut pertumbuhan dan PDRB per kapita relatif terhadap provinsi, Structural Change Index (SCI) mengukur besarnya perubahan susunan sektor antara 2021 dan 2025, dan Location Quotient (LQ) mengidentifikasi sektor basis (Hoover & Giarratani, 2020; Anshori & Fahrati, 2025). Kebaruannya terletak pada pembacaan gabungan itu, yang memperlihatkan apakah daerah dengan posisi pertumbuhan tertentu juga mengalami tingkat transformasi sektoral yang sama. Kebaruan penelitian ini terletak pada pembacaan terpadu ketiga dimensi tersebut atas tujuh kabupaten/kota kepulauan dalam satu provinsi, yang memperlihatkan bahwa posisi pertumbuhan, besar perubahan struktur, dan tingkat spesialisasi tidak selalu bergerak searah. Bintan dan Batam, misalnya, sama-sama berada pada posisi pertumbuhan tinggi, tetapi hanya Bintan yang susunan sektornya berubah besar. Natuna dan Kepulauan Anambas berpendapatan per kapita tinggi, tetapi strukturnya nyaris tetap dan bertumpu pada pertambangan. Pembacaan ini bersifat deskriptif, namun berguna sebagai peta awal bagi perencanaan pembangunan ekonomi dan hilirisasi sektoral di wilayah kepulauan, karena memperlihatkan daerah mana yang sudah berbasis industri pengolahan dan daerah mana yang basisnya masih primer atau jasa, tanpa menilai dampak kebijakan hilirisasi itu sendiri.

Nabilla et al. (2024) meneliti pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi lima kota besar di Sumatera selama 2017–2022, dan menemukan bahwa sektor primer bergeser negatif sementara sebagian besar sektor sekunder dan tersier meningkat. Penelitian ini mengkaji tujuh kabupaten/kota di Kepri yang berkarakter kepulauan dan berbeda dalam basis ekonominya.

Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan menggambarkan perbedaan karakteristik pertumbuhan ekonomi antarkabupaten/kota, mengukur perubahan struktur ekonomi selama 2021–2025, dan mengidentifikasi sektor basis pada masing-masing wilayah. Hasil analisis kemudian dibaca dengan mempertimbangkan perbedaan keterkaitan daerah dengan aktivitas penghasil dan pengolah bauksit, tanpa membatasi pengamatan hanya pada sektor pertambangan atau industri pengolahan. Penelitian ini bersifat deskriptif, sehingga hasilnya digunakan untuk menjelaskan pola dan variasi ekonomi

antardaerah, bukan untuk menetapkan hubungan sebab-akibat antara hilirisasi bauksit dan pertumbuhan maupun transformasi struktur ekonomi.

2. Tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis

Penelitian ini bersifat deskriptif, sehingga tidak ada hipotesis statistik yang diuji. Sebagai gantinya, bagian ini merumuskan tiga pertanyaan penelitian yang bersumber dari teori dan studi terdahulu di bawah ini.

2.1 Landasan teori

2.1.1 Teori basis ekonomi.

Teori ini membagi kegiatan ekonomi suatu wilayah menjadi dua kelompok. Kegiatan basis menjual barang atau jasa ke luar wilayah sehingga mendatangkan pendapatan dari luar, sedangkan kegiatan nonbasis melayani kebutuhan penduduk setempat dan ikut tumbuh bersama kegiatan basis (Edgar M. Hoover, 2020). Atas dasar pembagian tersebut, sektor yang porsinya di suatu daerah lebih besar daripada porsi sektor yang sama di wilayah acuan dianggap sebagai sektor basis, dan LQ menjadi ukuran yang lazim dipakai untuk menilainya (Anshori & Fahrati, 2025).

2.1.2 Teori perubahan struktural.

Menurut Chenery & Syrquin (1975), kenaikan pendapatan biasanya disertai pergeseran susunan produksi dari sektor primer ke industri, kemudian ke jasa. Pergeseran itu didorong oleh naiknya produktivitas, bertambahnya investasi, kemajuan teknologi, dan berubahnya pola konsumsi. Tazkiya et al. (2025) menggunakan kerangka serupa untuk membaca perekonomian Indonesia, dan Junaedi et al. (2026) mencatat bahwa di negara berkembang peran sektor primer lazimnya surut ketika sektor sekunder dan tersier makin berperan. Sen (2019) menambahkan peringatan bahwa pola tersebut tidak persis sama di setiap negara atau wilayah. Teori ini dipakai di sini untuk menilai arah perubahan di tiap daerah, yaitu apakah porsi sektor primer menurun dan porsi industri atau jasa meningkat.

Karakteristik wilayah kepulauan, Briguglio (1995) menyebut ukuran kecil, keterpencilan, dan sifat kepulauan sebagai sumber kerentanan ekonomi, sedangkan Teyansyah et al. (2026) menunjukkan bahwa negara kepulauan menghadapi keterbatasan konektivitas yang berimbas pada biaya distribusi. Biro Umum Provinsi Kepulauan Riau (2025) menggambarkan Kepri sebagai provinsi yang didominasi perairan. Ketiga rujukan ini menjadi alasan untuk tidak memperlakukan Kepri sebagai satu kesatuan yang seragam.

2.2 Penelitian terdahulu

No	Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Andriansyah et al. (2023)	Structural Change and Regional Economic Growth in Indonesia	Shift-Share, GMM, SCI	Perubahan struktur ekonomi berdampak positif pada pertumbuhan regional karena aktivitas bergeser ke sektor yang lebih produktif.
2	Pascal (2023)	Identification of Leading Sectors in Batam: LQ, DLQ, and Shift-Share Analysis	LQ, DLQ, Shift-Share	Industri pengolahan dan konstruksi menjadi sektor unggulan Kota Batam.
3	Akita & Alisjahbana (2023)	The Initial Impacts of the COVID-19 Pandemic on Regional Economies in Indonesia	Analisis perubahan struktural, dekomposisi ketimpangan (squared WCV)	Pandemi mengubah komposisi sektor ekonomi regional dan memperlebar ketimpangan antarwilayah.

No	Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
4	Sandra et al. (2025)	Analisis Sektor Unggulan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020–2023	LQ, DLQ, Tipologi Klassen	Real estat dan perdagangan tergolong sektor maju dan tumbuh cepat, sedangkan pertanian tetap menjadi sektor basis.
5	Anshori & Fahrati (2025)	Analisis Penentuan Sektor Basis dan Sektor Unggulan Kabupaten Tanah Laut	LQ, DLQ, MRP, Tipologi Klassen, Overlay	Pertambangan menjadi sektor basis dan unggulan, sedangkan industri pengolahan berpotensi menyusul.
6	Fabiany (2021)	Analisis Sektor Unggulan Perekonomian di Provinsi Jambi Tahun 2020	LQ, DLQ, Tipologi Klassen, Overlay	Pertanian dan industri pengolahan menjadi sektor unggulan dengan daya saing tinggi.
7	Novita & Malau (2025)	Analisis Peran Sektor Perdagangan dalam Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi di Kota Ternate	Analisis kontribusi, LQ (SLQ & DLQ), Tipologi Klassen	Sektor perdagangan berperan penting mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Ternate.
8	Ibal & Murni (2023)	Analisis Sektor Unggulan Ekonomi dan Sektor Potensial di Provinsi Papua Barat Daya	LQ, DLQ, Tipologi Klassen	Ditemukan lima sektor basis, tetapi belum ada sektor yang tumbuh lebih cepat dari wilayah acuan.
9	Muljanto, (2021)	Analisis Sektor Unggulan dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Sidoarjo	LQ, DLQ, Tipologi Klassen	Industri pengolahan menjadi sektor unggulan dengan pertumbuhan dan kontribusi tinggi.
10	Augia et al. (2025)	Economic Structure and Economic Shift Analysis of Food Crop Commodities	LQ, DLQ, LI, SI, Tipologi Klassen, Shift-Share	Beberapa komoditas pangan menjadi basis, tumbuh lebih cepat dari acuan, dan bergeser positif.
11	Elisabeth et al. (2025)	Potensi Ekonomi Wilayah Pertumbuhan Rendah dan Pendapatan Tinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tipologi Klassen, LQ, Shift-Share	Kabupaten Belitung masuk kategori pertumbuhan rendah dan pendapatan tinggi, dengan beberapa sektor basis yang berpotensi menopang pertumbuhan.

3. Metodologi penelitian

3.1 Pendekatan dan bahan analisis

Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif dan memakai data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS). Bahan analisis berupa PDRB Provinsi Kepri dan tujuh kabupaten/kota yang diukur dengan harga konstan (ADHK) dan dirinci ke dalam 17 lapangan usaha dalam miliar rupiah, PDB Indonesia dengan rincian serupa, laju pertumbuhan PDRB, serta PDRB per kapita, seluruhnya untuk 2021–2025 (Badan Pusat Statistik, 2026). Tujuh daerah yang dianalisis adalah Bintan, Batam, Karimun, Tanjungpinang, Lingga, Natuna, dan Kepulauan Anambas. Seluruh pengolahan dilakukan dengan Microsoft Excel, dan setiap alat dihitung dalam lembar kerja yang terpisah.

Data penelitian bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan mencakup PDRB Provinsi Kepulauan Riau serta PDRB tujuh kabupaten/kota di dalamnya. Seluruh nilai PDRB memakai satu basis harga yang sama, yaitu harga konstan (ADHK) 2010, dan dikelompokkan ke dalam 17 lapangan usaha dengan satuan miliar rupiah. Data atas dasar harga berlaku (ADHB) tidak dipakai pada perhitungan Tipologi Klassen, SCI, maupun LQ, sehingga laju pertumbuhan, PDRB per kapita, dan porsi sektor tidak dipengaruhi oleh perubahan harga. PDRB per kapita Provinsi Kepulauan Riau dan tujuh kabupaten/kota diambil dari tabel BPS atas dasar harga konstan 2010 dan disajikan dalam satuan juta rupiah per jiwa. Karena angka provinsi dan kabupaten/kota berasal dari seri BPS yang sama, pembanding Yi terhadap Y memakai basis harga dan satuan yang sama.

3.2 Tipologi Klassen

Tipologi Klassen menempatkan setiap kabupaten/kota pada salah satu dari empat kuadran dengan membandingkan dua angka rata-rata periode 2021–2025 terhadap angka provinsi. Angka pertama adalah rata-rata laju pertumbuhan PDRB daerah (Ri) terhadap rata-rata provinsi (R), dan angka kedua adalah rata-rata PDRB per kapita daerah (Yi) terhadap rata-rata provinsi (Y). Ri dihitung sebagai rata-rata sederhana dari lima laju tahunan. Klasifikasi mengikuti Elisabeth et al. (2025) dan dirangkum pada

Tabel 1.

Tabel 1. Kriteria klasifikasi Tipologi Klassen

Kondisi	**Yi > Y**	**Yi < Y**
Ri > R	Kuadran I: maju dan tumbuh cepat	Kuadran III: berkembang
Ri < R	Kuadran II: maju tetapi tertekan	Kuadran IV: relatif tertinggal

Sumber: Elisabeth et al. (2025).

3.3 Structural Change Index

SCI menjumlahkan selisih mutlak porsi setiap sektor terhadap total PDRB daerah itu sendiri antara 2021 dan 2025, lalu membaginya dua (Hill et al., 2008, dalam Andriansyah et al., 2023). Hasilnya dinyatakan dalam poin persentase. Nilai SCI makin besar apabila porsi sektor makin banyak bergeser. Persamaan (1) memperlihatkan perhitungannya.

$$SCI = \tfrac{1}{2} \Sigma \left| VA_{iT} - VA_{i0} \right| \quad (1)$$

Pada persamaan (1), VA adalah porsi sektor ke-i terhadap total PDRB daerah, T adalah 2025, dan 0 adalah 2021. Karena memakai nilai mutlak, SCI hanya menunjukkan besarnya perubahan dan tidak menunjukkan arahnya. Arah pergeseran dibaca dari porsi tiap sektor pada 2021 dan 2025.

3.4 Location Quotient

Location Quotient (LQ) digunakan untuk mengidentifikasi sektor basis melalui perbandingan proporsi sektor terhadap total PDRB di suatu wilayah dengan wilayah referensinya. Penelitian ini menerapkan dua tingkat perbandingan, yaitu LQ kabupaten/kota terhadap Provinsi Kepulauan Riau dan LQ Provinsi Kepulauan Riau terhadap Indonesia. Analisis pertama bertujuan mengidentifikasi sektor basis pada masing-masing kabupaten/kota, sedangkan analisis kedua melihat posisi relatif sektor-sektor ekonomi Kepulauan Riau dalam perekonomian nasional. Nilai LQ lebih dari 1 menunjukkan sektor basis, nilai sama dengan 1 menunjukkan proporsi yang setara, dan nilai kurang dari 1 menunjukkan proporsi sektor yang lebih rendah dibandingkan wilayah referensi (Anshori & Fahrati, 2025 ; Anggreani et al., 2023). Persamaan (2) memperlihatkan perhitungannya.

$$LQ_i = (y_{ij} / y_j) / (y_{iR} / y_R) \quad (2)$$

Notasi y_{ij} adalah PDRB sektor i di kabupaten/kota, y_j adalah total PDRB kabupaten/kota itu, y_{iR} adalah PDRB sektor i Provinsi Kepri, dan y_R adalah total PDRB Provinsi Kepri. Pada analisis LQ Provinsi Kepulauan Riau terhadap Indonesia, Provinsi Kepulauan Riau berperan sebagai wilayah yang dianalisis, sedangkan Indonesia menjadi wilayah pembanding. Nilai LQ di atas 1 menunjukkan bahwa

proporsi suatu sektor di wilayah analisis lebih tinggi daripada proporsinya di wilayah referensi. Sebaliknya, nilai LQ di bawah 1 menunjukkan proporsi yang lebih rendah, sementara nilai LQ sebesar 1 menandakan proporsi yang sama pada kedua wilayah.

3.5 Sumber data, prosedur pengolahan, dan contoh perhitungan

Sumber dataset. Seluruh data bersumber dari BPS dan memakai PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 dalam miliar rupiah untuk periode 2021–2025 (Badan Pusat Statistik, 2026). Data terdiri atas lima kelompok: (1) PDRB ADHK Provinsi Kepri menurut 17 lapangan usaha; (2) PDRB ADHK tujuh kabupaten/kota menurut 17 lapangan usaha, yang diambil dari tabel PDRB menurut lapangan usaha masing-masing daerah; (3) PDB ADHK Indonesia menurut 17 lapangan usaha, yang menjadi pembanding pada LQ Provinsi Kepri terhadap nasional; (4) laju pertumbuhan tahunan PDRB provinsi dan kabupaten/kota, dengan laju 2021 dihitung terhadap 2020; serta (5) PDRB per kapita provinsi dan kabupaten/kota atas dasar harga konstan 2010. Setiap kelompok dipakai pada alat tertentu: kelompok (4) dan (5) untuk Tipologi Klassen, kelompok (1) dan (2) untuk SCI dan LQ kabupaten/kota, serta kelompok (3) hanya untuk LQ Provinsi Kepri terhadap nasional. Klasifikasi 17 lapangan usaha mengikuti pengelompokan BPS tanpa penggabungan atau pemisahan oleh penulis. Nilai PDRB per kapita disajikan dalam juta rupiah (Tabel 3). Satuan, tahun dasar harga, dan cakupan periode setiap tabel BPS dicocokkan dengan keterangan (metadata) pada tabel tersebut sebelum data diolah.

3.5.1 Prosedur pengolahan

Pengolahan dilakukan dengan urutan yang sama untuk setiap daerah. Pertama, seluruh seri diperiksa agar memakai harga konstan 2010, satuan, dan periode yang seragam, dan jumlah 17 lapangan usaha tiap daerah dicocokkan dengan total yang dilaporkan BPS; selisihnya paling besar Rp0,03 miliar dan berasal dari pembulatan. Kedua, porsi tiap lapangan usaha dihitung terhadap total PDRB daerahnya, pada 2021 dan 2025 untuk SCI serta pada setiap tahun 2021–2025 untuk LQ. Ketiga, rata-rata Ri, R, Yi, dan Y periode 2021–2025 dibandingkan untuk menentukan kuadran Klassen menurut Tabel 1. Keempat, hasil ketiga alat disandingkan untuk setiap daerah pada bagian 4.5. Perhitungan memakai angka tanpa pembulatan, dan pembulatan hanya dilakukan pada penyajian hasil, yaitu pada bagian 4.2 sampai 4.4.

3.5.2 Perbedaan agregat PDRB

Jumlah PDRB tujuh kabupaten/kota tidak sama dengan PDRB provinsi. Pada ADHK, jumlah ketujuh daerah lebih rendah Rp3.871,58 miliar (2,14 persen) daripada PDRB provinsi pada 2021, dan selisihnya menyempit menjadi Rp1.617,71 miliar (0,72 persen) pada 2025. Selisih menurut sektor tidak searah. Pada 2025, PDRB provinsi lebih tinggi pada konstruksi (Rp3.151,04 miliar) serta pertambangan dan penggalian (Rp1.290,37 miliar), sedangkan jumlah kabupaten/kota lebih tinggi pada pertanian (Rp1.141,60 miliar). Tabel BPS yang dipakai tidak menjelaskan penyebab selisih ini, dan penelitian tidak mengoreksinya. Dampaknya berbeda menurut alat. Porsi sektor kabupaten/kota dihitung terhadap total PDRB daerah itu sendiri, sehingga SCI tidak terpengaruh. Pada Tipologi Klassen, R dan Y provinsi hanya menjadi pembanding. Pada LQ, PDRB provinsi menjadi acuan, sehingga hanya alat inilah yang dapat terpengaruh. Untuk memeriksanya, LQ kabupaten/kota dihitung ulang dengan jumlah PDRB tujuh kabupaten/kota sebagai pengganti PDRB provinsi pada Persamaan (2). Dari 595 kombinasi daerah, sektor, dan tahun ($7 \times 17 \times 5$), status basis berubah pada 10 kombinasi (1,7 persen). Pada 2025, perubahan hanya terjadi pada 2 dari 119 kombinasi, yaitu sektor konstruksi di Karimun (LQ 0,958 menjadi 1,027) dan Batam (LQ 0,982 menjadi 1,052), sektor yang selisih agregatnya terbesar pada tahun itu. Sembilan dari sepuluh perubahan terjadi pada sektor yang LQ-nya terhadap provinsi berada di antara 0,94 dan 1,05, yaitu sangat dekat dengan batas 1. Dengan demikian, penggolongan basis tidak banyak bergantung pada pilihan acuan, kecuali untuk sektor yang berada tepat di sekitar batas 1.

3.5.3 Contoh perhitungan

Contoh memakai angka Kabupaten Bintan. Pada Tipologi Klassen, Ri adalah rata-rata lima laju tahunan Bintan, yaitu $(0{,}23 + 7{,}66 + 8{,}32 + 8{,}89 + 6{,}43) \div 5 = 6{,}31$ persen, sedangkan R provinsi sebesar $(3{,}43 + 5{,}06 + 5{,}16 + 5{,}02 + 6{,}94) \div 5 = 5{,}12$ persen. Yi Bintan sebesar Rp98,36 juta dan Y provinsi sebesar Rp92,62 juta. Karena Ri > R dan Yi > Y, Bintan masuk kuadran I menurut Tabel 1.

Pada SCI (Persamaan 1), tiga sektor dengan perubahan porsi terbesar menyumbang selisih mutlak |44,94 − 40,10| + |1,64 − 4,79| + |6,14 − 3,79| = 4,84 + 3,15 + 2,35 = 10,34 poin, masing-masing untuk industri pengolahan, pertambangan dan penggalian, serta akomodasi dan makan minum. Ke-14 sektor lainnya menyumbang 5,18 poin, sehingga jumlah seluruh selisih mutlak adalah 15,53 poin (hasil penjumlahan sebelum pembulatan) dan SCI = ½ × 15,53 = 7,76.

Pada LQ (Persamaan 2), porsi industri pengolahan Bintan pada 2025 adalah 44,94 persen dari PDRB Bintan, sedangkan porsinya di Provinsi Kepri adalah 41,96 persen, sehingga LQ = 44,94 ÷ 41,96 = 1,071. Nilai ini di atas 1, sehingga sektor tersebut tergolong basis. Pada analisis tingkat kedua, porsi industri pengolahan Kepri sebesar 41,96 persen dibandingkan dengan porsinya di Indonesia sebesar 20,31 persen, sehingga LQ = 41,96 ÷ 20,31 = 2,066.

3.5.4 Contoh pembanding

Agar prosedur tidak hanya tampak pada daerah yang bergeser ke industri, ketiga ukuran juga dihitung untuk Kota Tanjungpinang. Pada Tipologi Klassen, Ri sebesar (0,59 + 4,12 + 4,92 + 3,78 + 3,31) ÷ 5 = 3,34 persen lebih rendah daripada R sebesar 5,12 persen, dan Yi sebesar Rp64,91 juta lebih rendah daripada Y sebesar Rp92,62 juta, sehingga Tanjungpinang masuk kuadran IV menurut Tabel 1. Pada SCI (Persamaan 1), tiga sektor dengan perubahan porsi terbesar menyumbang |26,03 − 31,40| + |29,07 − 25,80| + |5,86 − 4,16| = 5,37 + 3,27 + 1,70 = 10,34 poin, masing-masing untuk konstruksi, perdagangan, serta transportasi dan pergudangan. Karena SCI = 6,51, jumlah seluruh selisih mutlak adalah 2 × 6,51 = 13,02 poin, sehingga ke-14 sektor lainnya menyumbang sekitar 2,68 poin. Pada LQ (Persamaan 2), porsi perdagangan Tanjungpinang pada 2025 sebesar 29,07 persen dibandingkan dengan porsinya di Provinsi Kepri sebesar 8,29 persen menghasilkan LQ = 29,07 ÷ 8,29 = 3,507, sehingga perdagangan tergolong sektor basis.

4. Hasil dan pembahasan

Hasil disajikan menurut alat analisis, yaitu Tipologi Klassen, SCI, dan LQ, dengan tabel yang terpisah untuk masing-masing alat.

4.1 Gambaran umum wilayah data penelitian

Gambar 1 menunjukkan perkembangan PDRB ADHK Provinsi Kepulauan Riau beserta tujuh kabupaten/kota yang menjadi dasar dalam ketiga analisis penelitian. Data tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan skala ekonomi yang cukup besar antardaerah. Pada 2025, PDRB Kota Batam tercatat sebesar Rp144.674,74 miliar, jauh melampaui Kabupaten Lingga yang mencapai Rp3.475,95 miliar. Dominasi Batam juga terlihat dari kontribusinya terhadap PDRB provinsi, yang meningkat dari 61,38 persen pada 2021 menjadi 64,44 persen pada 2025. Secara agregat, PDRB Provinsi Kepulauan Riau bertambah dari Rp180.952,44 miliar menjadi Rp224.504,72 miliar selama periode tersebut. Peningkatan juga terjadi di Kabupaten Bintan, dari Rp13.933,49 miliar menjadi Rp18.830,80 miliar. Sementara itu, perkembangan PDRB Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas

menunjukkan pola yang lebih berfluktuasi. Pada 2024, PDRB kedua daerah tersebut masing-masing turun menjadi Rp14.258,64 miliar dan Rp10.553,18 miliar, sebelum kembali meningkat pada 2025.

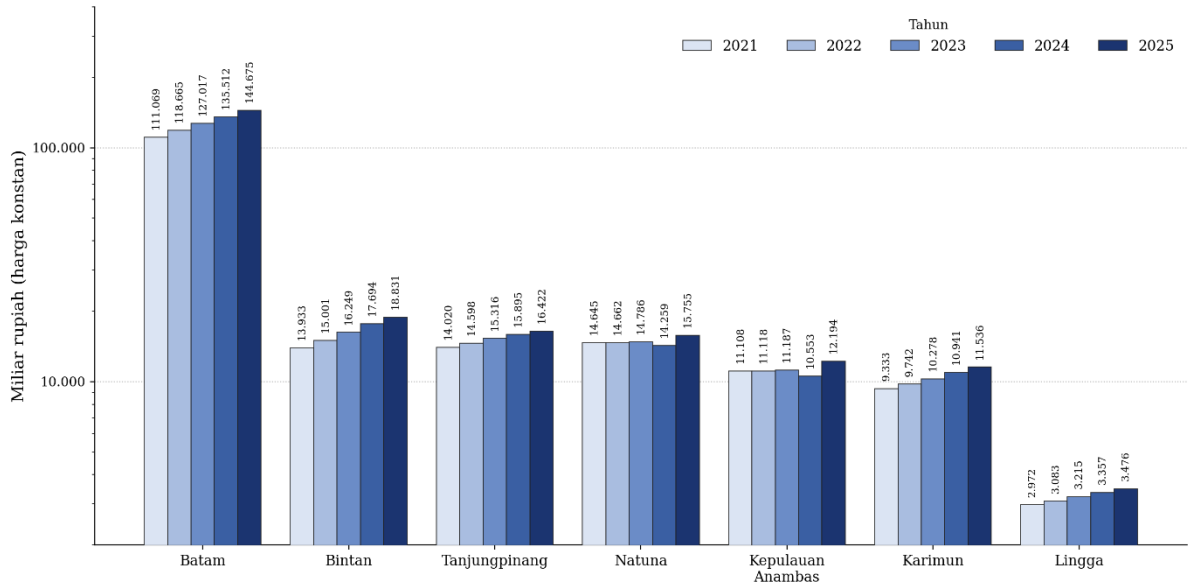

Gambar 1. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2021–2025 (Miliar Rupiah)

4.2 Hasil Tipologi Klassen

Tabel 2 memuat laju pertumbuhan PDRB tahunan. Provinsi tumbuh 3,43 persen pada 2021, kemudian 5,06; 5,16; 5,02; dan 6,94 persen pada 2022 sampai 2025, dengan rata-rata (R) sebesar 5,12 persen. Pola kabupaten/kota jauh lebih bervariasi. Bintan hampir tidak tumbuh pada 2021 (0,23 persen), tetapi bergerak ke 7,66; 8,32; dan 8,89 persen pada tiga tahun berikutnya sebelum turun ke 6,43 persen pada 2025. Batam naik dari 4,75 persen pada 2021 lalu bertahan di kisaran 6,69 sampai 7,04 persen. Natuna dan Kepulauan Anambas tumbuh sangat rendah pada 2021–2023, mengalami kontraksi pada 2024 masing-masing sebesar 3,57 dan 5,67 persen, lalu melonjak ke 10,49 dan 15,54 persen pada 2025.

Tabel 2. Laju pertumbuhan PDRB ADHK, 2021–2025 (persen)

Daerah	2021	2022	2023	2024	2025	Rata-rata
Kabupaten Bintan	0,23	7,66	8,32	8,89	6,43	6,31
Kota Batam	4,75	6,84	7,04	6,69	6,76	6,42
Kabupaten Karimun	2,37	4,38	5,50	6,45	5,44	4,83
Kota Tanjungpinang	0,59	4,12	4,92	3,78	3,31	3,34
Kabupaten Lingga	1,95	3,74	4,30	4,42	3,53	3,59
Kabupaten Natuna	0,02	0,11	0,85	-3,57	10,49	1,58
Kabupaten Kepulauan Anambas	0,04	0,09	0,62	-5,67	15,54	2,12
Provinsi Kepri (R)	3,43	5,06	5,16	5,02	6,94	5,12

Sumber: Badan Pusat Statistik, (2026), diolah penulis dengan Microsoft Excel.

Tabel 3 menunjukkan PDRB per kapita. Rata-rata provinsi (Y) sebesar Rp92,62 juta, dari Rp85,43 juta pada 2021 menjadi Rp101,43 juta pada 2025. Nilai terendah dimiliki Lingga, yaitu Rp30,01 juta pada 2021 dan Rp33,76 juta pada 2025. Nilai tertinggi dimiliki Kepulauan Anambas (Rp232,52 juta menjadi Rp242,12 juta), yang sempat turun hingga Rp212,22 juta pada 2024. Natuna menunjukkan pola yang serupa, dari Rp178,00 juta menjadi Rp181,60 juta dengan titik terendah Rp166,45 juta pada 2024. Nilai per kapita yang tinggi di kedua daerah ini perlu dibaca bersama porsi pertambangan yang sangat besar

pada struktur PDRB-nya (bagian 4.3). PDRB per kapita menggambarkan rata-rata dan tidak mengukur pemerataan pendapatan rumah tangga.

Tabel 3. PDRB per kapita atas dasar harga konstan, 2021–2025 (ribu rupiah)

Daerah	2021	2022	2023	2024	2025	Rata-rata
Kabupaten Karimun	36,61	37,79	39,44	41,55	43,37	39,75
Kabupaten Bintan	86,45	91,72	97,95	105,20	110,47	98,36
Kabupaten Natuna	178,00	175,74	174,87	166,45	181,60	175,33
Kabupaten Lingga	30,01	30,82	31,83	32,91	33,76	31,87
Kabupaten Kepulauan Anambas	232,52	229,51	227,88	212,22	242,12	228,85
Kota Batam	91,41	96,01	101,08	106,12	111,55	101,23
Kota Tanjungpinang	61,08	62,87	65,22	66,94	68,43	64,91
Provinsi Kepri (Y)	85,43	87,21	92,87	96,16	101,43	92,62

Sumber: Badan Pusat Statistik, (2026), diolah penulis dengan Microsoft Excel.

Tabel 4 menyajikan hasil klasifikasi dengan membandingkan Ri terhadap R dan Yi terhadap Y. Ketujuh daerah tersebar pada tiga kuadran, sedangkan kuadran III tidak dihuni daerah mana pun. Gambar 2 menampilkan posisi yang sama dalam bentuk grafik.

Tabel 4. Hasil Tipologi Klassen kabupaten/kota, 2021–2025

Daerah	Ri (%)	R (%)	Yi (juta)	Y (juta)	Kuadran
Kabupaten Bintan	6,31	5,12	98,36	92,62	I
Kota Batam	6,42	5,12	101,23	92,62	I
Kabupaten Karimun	4,83	5,12	39,75	92,62	IV
Kota Tanjungpinang	3,34	5,12	64,91	92,62	IV
Kabupaten Lingga	3,59	5,12	31,87	92,62	IV
Kabupaten Natuna	1,58	5,12	175,33	92,62	II
Kabupaten Kepulauan Anambas	2,12	5,12	228,85	92,62	II

Sumber: Badan Pusat Statistik, (2026), diolah penulis dengan Microsoft Excel.

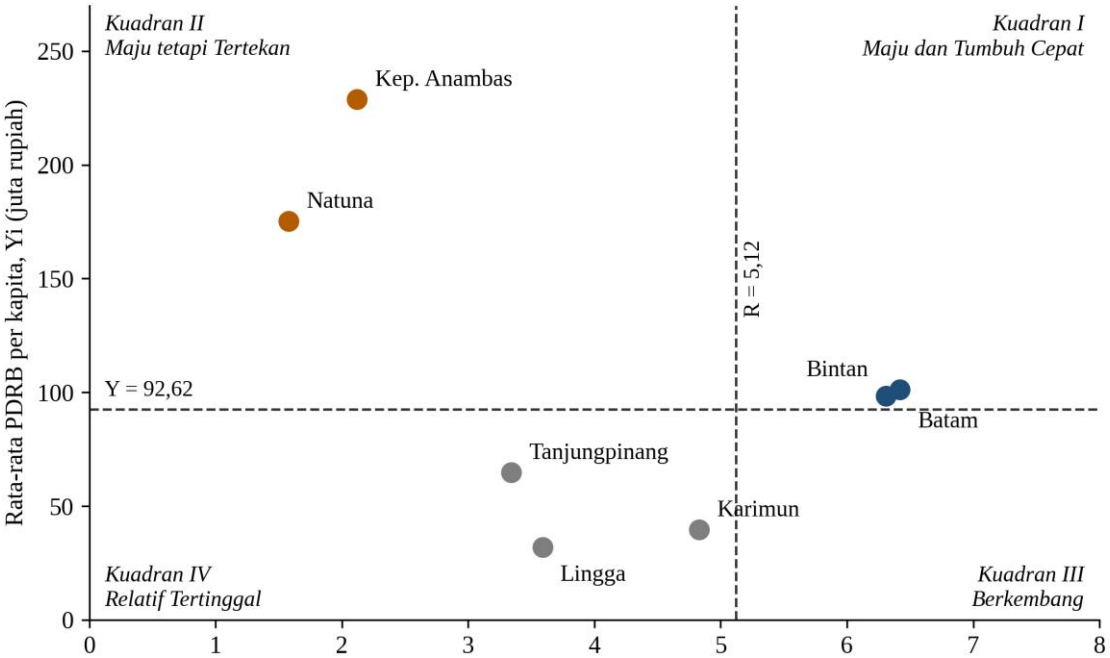

Gambar 2. Posisi tujuh kabupaten/kota menurut Tipologi Klassen, 2021–2025
Sumber: Badan Pusat Statistik, (2026), diolah penulis dengan Microsoft Excel.

4.2.1 Kuadran I: Bintan dan Batam

Bintan masuk kuadran I karena Ri sebesar 6,31 persen melampaui R sebesar 5,12 persen, dan Yi sebesar Rp98,36 juta berada di atas Y sebesar Rp92,62 juta. Batam memiliki Ri tertinggi dari tujuh daerah, yaitu 6,42 persen, dengan Yi Rp101,23 juta. Yi kedua daerah berada tidak jauh di atas Y, sehingga selisih pendapatan per kapita keduanya terhadap provinsi kecil.

4.2.2 Kuadran II: Natuna dan Kepulauan Anambas

Natuna (Ri 1,58 persen; Yi Rp175,33 juta) dan Kepulauan Anambas (Ri 2,12 persen; Yi Rp228,85 juta) memiliki pendapatan per kapita yang jauh di atas provinsi, tetapi pertumbuhan yang jauh di bawahnya. Kombinasi pendapatan tinggi dan pertumbuhan rendah ini sejenis dengan tipe wilayah yang dikaji Elisabeth et al. (2025) di Kepulauan Bangka Belitung. Rata-rata Ri kedua daerah dipengaruhi kontraksi pada 2024 yang disusul lonjakan pada 2025 (Tabel 2), sehingga kuadran II mencerminkan ayunan yang lebar dan bukan laju rendah yang konsisten dari tahun ke tahun.

4.2.3 Kuadran IV: Karimun, Tanjungpinang, dan Lingga

Karimun (Ri 4,83 persen; Yi Rp39,75 juta), Tanjungpinang (Ri 3,34 persen; Yi Rp64,91 juta), dan Lingga (Ri 3,59 persen; Yi Rp31,87 juta) berada di bawah angka provinsi pada kedua indikator. Karimun paling mendekati R di antara ketiganya. Tanjungpinang memiliki Yi tertinggi di kuadran ini, tetapi Ri terendah, sedangkan Lingga memiliki Yi terendah di antara seluruh tujuh daerah.

4.2.4 Kuadran III

Tidak ada kabupaten/kota di kuadran III, artinya tidak ada daerah yang tumbuh lebih cepat daripada provinsi sambil berpendapatan per kapita lebih rendah. Dua daerah yang tumbuh di atas R, yaitu Bintan dan Batam, sekaligus berpendapatan di atas Y.

4.3 Hasil Structural Change Index

Gambar 3 menyajikan nilai SCI. Nilai terbesar dimiliki Bintan (7,76), disusul Tanjungpinang (6,51) dan Karimun (6,39). Lingga (3,69) berada sedikit di atas provinsi (3,44), sedangkan Batam (2,07), Kepulauan Anambas (1,11), dan Natuna (0,96) berada di bawahnya. Gambar 3 memperlihatkan urutan tersebut.

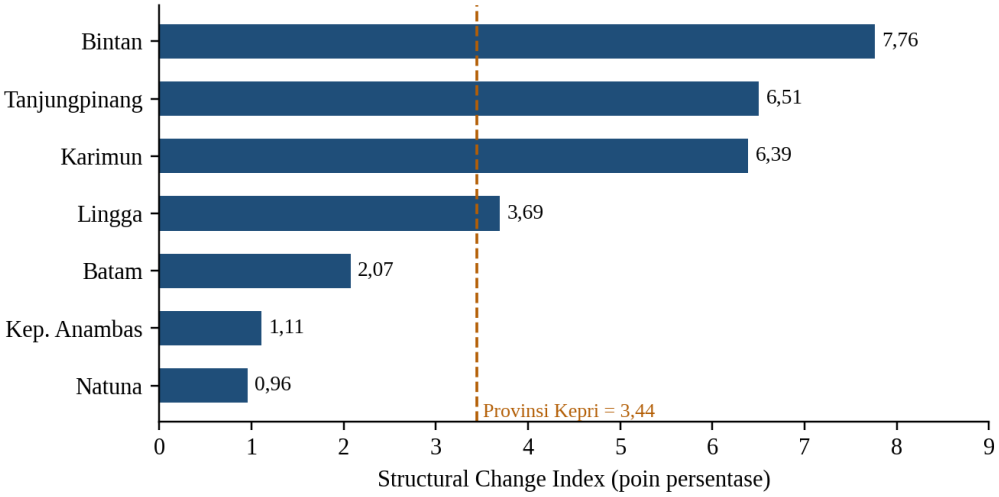

Gambar 3. Besar perubahan susunan sektor (SCI) tujuh kabupaten/kota, 2021 ke 2025

Karena SCI memakai nilai mutlak, Tabel 5 mencantumkan tiga sektor dengan perubahan porsi terbesar di setiap daerah beserta arahnya. Pada tabel itu, tanda plus menunjukkan porsi yang naik dan tanda minus menunjukkan porsi yang turun.

Tabel 5. Tiga Sektor dengan Perubahan Pangsa Terbesar, 2021 ke 2025

Daerah	Sektor	Pangsa 2021 (%)	Pangsa 2025 (%)	Selisih (poin)
Kabupaten Bintan	C. Industri pengolahan	40,10	44,94	+4,84
	B. Pertambangan dan penggalian	4,79	1,64	−3,15
	I. Akomodasi dan makan minum	3,79	6,14	+2,35
Kota Batam	F. Konstruksi	19,70	18,78	−0,92
	I. Akomodasi dan makan minum	1,28	2,01	+0,73
	C. Industri pengolahan	58,23	57,51	−0,72
Kabupaten Karimun	C. Industri pengolahan	13,23	15,97	+2,74
	B. Pertambangan dan penggalian	10,83	8,25	−2,58
	A. Pertanian	15,79	14,22	−1,57
Kota Tanjungpinang	F. Konstruksi	31,40	26,03	−5,37
	G. Perdagangan	25,80	29,07	+3,27
	H. Transportasi dan pergudangan	4,16	5,86	+1,70
Kabupaten Lingga	G. Perdagangan	21,21	23,46	+2,25
	A. Pertanian	23,08	21,35	−1,72
	F. Konstruksi	20,14	19,17	−0,97
Kabupaten Natuna	F. Konstruksi	7,27	6,74	−0,53
	G. Perdagangan	3,12	3,55	+0,43
	A. Pertanian	11,69	11,44	−0,24
Kabupaten Kepulauan Anambas	B. Pertambangan dan penggalian	81,53	80,76	−0,77
	G. Perdagangan	2,37	2,94	+0,57
	A. Pertanian	5,71	5,42	−0,30
Provinsi Kepri	B. Pertambangan dan penggalian	13,68	10,67	−3,01
	I. Akomodasi dan makan minum	1,30	2,15	+0,84
	G. Perdagangan	7,51	8,29	+0,78

Sumber: BPS (2026), diolah penulis dengan Microsoft Excel. Porsi dihitung terhadap total PDRB masing-masing daerah.

4.3.1 Kabupaten Bintan

Struktur ekonomi Kabupaten Bintan pada 2021–2025 mengalami perubahan yang terutama terlihat dari meningkatnya pangsa industri pengolahan. Kontribusi sektor ini terhadap PDRB bertambah 4,84 poin persentase, dari 40,10 persen pada 2021 menjadi 44,94 persen pada 2025. Sebaliknya, pangsa pertambangan dan penggalian turun dari 4,79 persen menjadi 1,64 persen, sedangkan pangsa akomodasi dan makan minum meningkat dari 3,79 persen menjadi 6,14 persen. Pada periode yang sama, KEK Galang Batang di Bintan mulai memproduksi dan mengekspor Smelter Grade Alumina (SGA). Kesamaan waktu ini hanya menjadi konteks dan tidak menunjukkan bahwa pengolahan bauksit menyebabkan perubahan pangsa tersebut. Industri pengolahan menjadi sektor yang semakin dominan dalam struktur ekonomi Bintan, sementara turunnya pangsa pertambangan dan naiknya pangsa akomodasi dan makan minum ikut membentuk pergeseran komposisi sektoral selama periode penelitian

4.3.2 Kota Batam

Perubahan di Batam kecil. Perubahan porsi terbesar hanya terjadi pada konstruksi yang turun dari 19,70 persen menjadi 18,78 persen, disusul akomodasi dan makan minum yang naik dari 1,28 persen menjadi 2,01 persen. Industri pengolahan tetap memegang lebih dari separuh PDRB, dengan porsi 58,23 persen pada 2021 dan 57,51 persen pada 2025. Nilai SCI sebesar 2,07 berada di bawah provinsi, sehingga

pertumbuhan tinggi Batam pada Tabel 2 tidak disertai pergeseran komposisi yang besar. Pertumbuhan tinggi Batam berlangsung bersamaan dengan perubahan komposisi sektoral yang relatif kecil.

4.3.3 Kabupaten Karimun

Karimun memiliki struktur yang relatif merata karena tidak ada sektor yang sangat dominan. Industri pengolahan naik 2,74 poin dari 13,23 persen menjadi 15,97 persen. Pertambangan turun dari 10,83 persen menjadi 8,25 persen, dan pertanian dari 15,79 persen menjadi 14,22 persen. Konstruksi tetap menjadi sektor terbesar (19,85 persen menjadi 18,34 persen), diikuti perdagangan (16,53 persen menjadi 17,58 persen). Perubahan pangsa tersebut menunjukkan berkurangnya kontribusi pertambangan dan pertanian, sementara pangsa industri pengolahan meningkat selama periode penelitian

4.3.4 Kota Tanjungpinang

Perubahan di Tanjungpinang bukan ke arah industrialisasi. Porsi konstruksi turun dari 31,40 persen menjadi 26,03 persen, dan nilainya sendiri menyusut dari Rp4.401,93 miliar menjadi Rp4.273,78 miliar. Perdagangan naik dari 25,80 persen menjadi 29,07 persen, transportasi dari 4,16 persen menjadi 5,86 persen, dan akomodasi dari 1,07 persen menjadi 1,74 persen. Porsi industri pengolahan justru turun dari 6,88 persen menjadi 6,34 persen.

4.3.5 Kabupaten Lingga

Perdagangan di Lingga naik dari 21,21 persen menjadi 23,46 persen sehingga melampaui pertanian, yang turun dari 23,08 persen menjadi 21,35 persen. Konstruksi juga berkurang, dari 20,14 persen menjadi 19,17 persen. SCI sebesar 3,69 hanya sedikit di atas provinsi, dan arah perubahannya menuju jasa, mirip Tanjungpinang tetapi dalam skala yang lebih kecil.

4.3.6 Kabupaten Natuna

Susunan ekonomi Natuna hampir tidak berubah selama lima tahun. Pertambangan menguasai 71,60 persen PDRB pada 2021 dan 71,71 persen pada 2025, diikuti pertanian (11,69 persen menjadi 11,44 persen) dan konstruksi (7,27 persen menjadi 6,74 persen). SCI sebesar 0,96 merupakan yang terendah dari tujuh daerah. Nilai tambah pertambangan Natuna turun dari Rp10.362,92 miliar pada 2023 menjadi Rp9.728,94 miliar pada 2024, lalu naik ke Rp11.297,79 miliar pada 2025. Gerakan itu searah dengan kontraksi pada 2024 dan lonjakan pada 2025 yang terlihat pada Tabel 2.

4.3.7 Kabupaten Kepulauan Anambas

Anambas serupa dengan Natuna. Porsi pertambangan turun tipis dari 81,53 persen pada 2021 menjadi 80,76 persen pada 2025, dan perubahan terbesar itu hanya 0,77 poin. SCI sebesar 1,11 menandakan perubahan susunan yang kecil. Nilai tambah pertambangan Anambas turun dari Rp8.972,86 miliar pada 2023 menjadi Rp8.272,41 miliar pada 2024, kemudian naik ke Rp9.847,39 miliar pada 2025. Lonjakan pertumbuhan 2025 karena itu merupakan pemulihan setelah kontraksi 2024 dan bukan tanda perubahan struktur.

4.3.8 Provinsi Kepulauan Riau

SCI provinsi sebesar 3,44. Perubahan porsi terbesar terjadi pada pertambangan, yang turun dari 13,68 persen menjadi 10,67 persen. Akomodasi dan makan minum naik dari 1,30 persen menjadi 2,15 persen, perdagangan dari 7,51 persen menjadi 8,29 persen, dan konstruksi dari 18,38 persen menjadi 19,14 persen. Porsi industri pengolahan provinsi nyaris tidak bergeser, yaitu 41,96 persen pada 2021 dan 41,96 persen pada 2025.

4.4 Hasil Location Quotient

Sebagai latar, Tabel 6 menyajikan LQ Provinsi Kepri terhadap nasional. Berdasarkan rata-rata lima tahun, pertambangan (1,575), industri pengolahan (2,040), pengadaan air (1,439), dan konstruksi (1,950) merupakan sektor basis provinsi, sedangkan sektor lainnya bernilai di bawah 1. Pengadaan listrik dan gas mendekati ambang, dengan LQ yang naik dari 0,882 pada 2021 menjadi 1,069 pada 2025 walaupun rata-ratanya 0,985. LQ pertambangan menurun dari 1,850 pada 2021 menjadi 1,330 pada

2024, lalu naik lagi ke 1,527 pada 2025. Karena LQ kabupaten/kota pada tabel berikutnya memakai provinsi sebagai acuan, sektor yang menonjol di suatu daerah berarti lebih menonjol daripada rata-rata Kepri, bukan dibandingkan dengan nasional.

Tabel 6. Location Quotient Provinsi Kepri terhadap nasional, 2021–2025

Sektor	2021	2022	2023	2024	2025	Rata-rata	Kategori
A. Pertanian	0,233	0,240	0,241	0,240	0,232	0,237	Nonbasis
B. Pertambangan dan penggalian	1,850	1,652	1,514	1,330	1,527	1,575	**Basis**
C. Industri pengolahan	2,042	2,039	1,995	2,059	2,066	2,040	**Basis**
D. Listrik dan gas	0,882	0,965	0,993	1,016	1,069	0,985	Nonbasis
E. Pengadaan air dan pengelolaan limbah	1,355	1,431	1,424	1,430	1,555	1,439	**Basis**
F. Konstruksi	1,854	1,912	2,012	1,988	1,982	1,950	**Basis**
G. Perdagangan	0,576	0,623	0,629	0,633	0,634	0,619	Nonbasis
H. Transportasi dan pergudangan	0,381	0,440	0,443	0,418	0,405	0,418	Nonbasis
I. Akomodasi dan makan minum	0,466	0,625	0,723	0,695	0,654	0,633	Nonbasis
J. Informasi dan komunikasi	0,521	0,527	0,587	0,546	0,482	0,533	Nonbasis
K. Jasa keuangan dan asuransi	0,639	0,655	0,678	0,696	0,685	0,671	Nonbasis
L. Real estat	0,414	0,427	0,443	0,456	0,458	0,440	Nonbasis
M,N. Jasa perusahaan	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	Nonbasis
O. Administrasi pemerintahan	0,680	0,687	0,711	0,787	0,734	0,720	Nonbasis
P. Jasa pendidikan	0,383	0,394	0,402	0,403	0,398	0,396	Nonbasis
Q. Jasa kesehatan	0,738	0,720	0,654	0,723	0,691	0,705	Nonbasis
R–U. Jasa lainnya	0,084	0,130	0,143	0,151	0,137	0,129	Nonbasis

Sumber: BPS (2026), diolah penulis dengan Microsoft Excel. Kategori ditentukan dari rata-rata lima tahun.

Tabel 7 dan Tabel 8 menyajikan LQ kabupaten/kota pada 2021 dan 2025 dengan provinsi sebagai acuan. Nilai di atas 1 dicetak tebal dan menandai sektor basis.

Tabel 7. Location Quotient kabupaten/kota terhadap Provinsi Kepri, 2021

Sektor	Bintan	Batam	Karimun	Tj. Pinang	Lingga	Natuna	Kep. Anambas
A. Pertanian	**2,278**	0,339	**5,368**	0,264	**7,846**	**3,974**	**1,943**
B. Pertambangan dan penggalian	0,350	0,005	0,792	0,001	0,357	**5,235**	**5,961**
C. Industri pengolahan	0,956	**1,388**	0,315	0,164	0,018	0,019	0,003
D. Listrik dan gas	0,167	**1,489**	0,335	0,289	0,311	0,087	0,066
E. Pengadaan air dan pengelolaan limbah	0,521	**1,570**	0,368	0,658	0,253	0,060	0,024
F. Konstruksi	**1,191**	**1,072**	**1,080**	**1,708**	**1,096**	0,396	0,327
G. Perdagangan	**1,300**	0,745	**2,200**	**3,435**	**2,824**	0,415	0,315
H. Transportasi dan pergudangan	**1,626**	0,827	**1,790**	**2,993**	0,928	0,390	0,092
I. Akomodasi dan makan minum	**2,908**	0,983	**1,411**	0,817	**1,755**	0,378	0,080
J. Informasi dan komunikasi	0,489	**1,187**	**1,218**	**1,278**	**1,269**	0,294	0,184
K. Jasa keuangan dan asuransi	0,696	**1,301**	0,647	**1,310**	0,333	0,054	0,056
L. Real estat	**1,046**	0,929	**2,556**	**2,834**	**2,099**	0,607	0,536
M,N. Jasa perusahaan	0,272	0,874	**5,776**	**4,609**	0,318	0,065	0,057
O. Administrasi pemerintahan	**1,120**	0,529	**1,647**	**4,602**	**3,412**	0,886	0,905
P. Jasa pendidikan	**1,600**	0,683	**2,712**	**3,579**	**5,664**	0,147	0,174
Q. Jasa kesehatan	**1,092**	0,761	**2,055**	**2,702**	**3,135**	0,319	0,228
R–U. Jasa lainnya	**1,088**	0,850	**7,400**	**6,530**	**4,707**	0,445	0,423

Sumber: Badan Pusat Statistik, (2026), diolah penulis dengan Microsoft Excel. Nilai tebal: LQ > 1.

Tabel 8. Location Quotient kabupaten/kota terhadap Provinsi Kepri, 2025

Sektor	Bintan	Batam	Karimun	Tj. Pinang	Lingga	Natuna	Kep. Anambas
A. Pertanian	**2,083**	0,278	**5,394**	0,276	**8,098**	**4,340**	**2,055**
B. Pertambangan dan penggalian	0,154	0,006	0,773	0,000	0,457	**6,720**	**7,568**
C. Industri pengolahan	**1,071**	**1,371**	0,381	0,151	0,016	0,018	0,003
D. Listrik dan gas	0,150	**1,446**	0,337	0,248	0,278	0,081	0,055
E. Pengadaan air dan pengelolaan limbah	0,434	**1,397**	0,346	0,646	0,235	0,057	0,022
F. Konstruksi	**1,041**	0,982	0,958	**1,360**	**1,002**	0,352	0,329
G. Perdagangan	**1,203**	0,722	**2,121**	**3,507**	**2,831**	0,428	0,355
H. Transportasi dan pergudangan	**1,232**	0,838	**1,748**	**2,992**	0,829	0,301	0,072
I. Akomodasi dan makan minum	**2,862**	0,936	**1,231**	0,810	**1,427**	0,240	0,055
J. Informasi dan komunikasi	0,388	**1,182**	**1,337**	**1,349**	**1,331**	0,241	0,197
K. Jasa keuangan dan asuransi	0,558	**1,314**	0,615	**1,305**	0,328	0,054	0,050
L. Real estat	0,836	0,953	**2,479**	**2,821**	**2,024**	0,650	0,533
M,N. Jasa perusahaan	0,211	0,704	**4,607**	**3,778**	0,202	0,045	0,038
O. Administrasi pemerintahan	**1,176**	0,504	**1,650**	**4,363**	**3,274**	0,977	0,956
P. Jasa pendidikan	**1,479**	0,630	**2,675**	**3,658**	**5,633**	0,165	0,190
Q. Jasa kesehatan	0,874	0,790	**1,830**	**3,147**	**3,118**	0,371	0,221
R–U. Jasa lainnya	0,644	0,620	**4,585**	**3,970**	**2,448**	0,243	0,249

Sumber: Badan Pusat Statistik, (2026), diolah penulis dengan Microsoft Excel. Nilai tebal: LQ > 1.

Tabel 9 melengkapi kedua tabel itu dengan nilai LQ kelima tahun untuk sektor yang menjadi sorotan di tiap daerah, sehingga arah perubahannya dari tahun ke tahun dapat dilihat.

Tabel 9. Location Quotient lima tahun untuk sektor sorotan di setiap daerah, 2021–2025

Daerah	Sektor	2021	2022	2023	2024	2025
Kabupaten Bintan	Industri pengolahan	0,956	1,037	1,087	1,097	1,071
Kota Batam	Industri pengolahan	1,388	1,390	1,392	1,376	1,371
Kabupaten Karimun	Industri pengolahan	0,315	0,312	0,327	0,378	0,381
Kota Tanjungpinang	Perdagangan	3,435	3,189	3,197	3,305	3,507
Kabupaten Lingga	Pertanian	7,846	7,664	7,771	7,787	8,098
Kabupaten Natuna	Pertambangan	5,235	5,851	6,253	6,936	6,720
Kabupaten Kepulauan Anambas	Pertambangan	5,961	6,680	7,156	7,969	7,568

Sumber: Badan Pusat Statistik, (2026), diolah penulis dengan Microsoft Excel.

Kabupaten Bintan

Analisis LQ memperlihatkan adanya perubahan status industri pengolahan di Kabupaten Bintan sepanjang 2021–2025. Pada awal periode, nilai LQ sektor ini sebesar 0,956 sehingga masih dikategorikan sebagai sektor nonbasis. Pada 2022, nilainya meningkat menjadi 1,037 dan terus naik hingga 1,087 pada 2023 serta 1,097 pada 2024. Meskipun sedikit menurun menjadi 1,071 pada 2025,

industri pengolahan tetap berstatus sektor basis. Perkembangan ini menunjukkan semakin kuatnya spesialisasi relatif industri pengolahan Bintan dibandingkan dengan struktur ekonomi Provinsi Kepulauan Riau. Hasil tersebut konsisten dengan analisis SCI yang memperlihatkan peningkatan pangsa industri pengolahan selama periode yang sama, dan kesesuaian ini bersifat deskriptif, bukan bukti bahwa aktivitas pengolahan bauksit menjadi penyebabnya. Selain industri pengolahan, terdapat tujuh sektor basis lainnya pada 2025, yaitu akomodasi dan makan minum (2,862), pertanian (2,083), pendidikan (1,479), transportasi (1,232), perdagangan (1,203), administrasi pemerintahan (1,176), dan konstruksi (1,041). Sebaliknya, pertambangan dan penggalian tetap menjadi sektor nonbasis, dengan nilai LQ yang turun dari 0,350 pada 2021 menjadi 0,154 pada 2025

4.4.1 Kota Batam

Industri pengolahan Batam nyaris tidak berubah, yaitu 1,388 pada 2021 dan 1,371 pada 2025 (Tabel 9). Sektor basis Batam pada 2025 adalah listrik dan gas (1,446), pengadaan air (1,397), industri pengolahan (1,371), jasa keuangan (1,314), dan informasi dan komunikasi (1,182). Konstruksi sempat menjadi basis pada 2021 (1,072) tetapi turun menjadi 0,982 pada 2025. Karena Batam merupakan bagian terbesar dari PDRB provinsi, provinsi yang menjadi acuan sebagian besar dibentuk oleh Batam sendiri. Temuan bahwa industri pengolahan menjadi basis di Batam sejalan dengan Pascal (2023), yang menempatkannya sebagai sektor unggulan kota ini, walaupun acuan dan alat analisisnya tidak persis sama.

4.4.2 Kabupaten Karimun

LQ industri pengolahan Karimun naik dari 0,315 pada 2021 menjadi 0,381 pada 2025, tetapi masih jauh di bawah 1, sehingga industri belum menjadi basis walaupun porsinya membesar pada Tabel 5. Sektor basis Karimun pada 2025 didominasi sektor primer dan jasa, yaitu pertanian (5,394), jasa lainnya (4,585), pendidikan (2,675), real estat (2,479), perdagangan (2,121), kesehatan (1,830), transportasi (1,748), administrasi pemerintahan (1,650), informasi dan komunikasi (1,337), dan akomodasi dan makan minum (1,231). Pertambangan belum menjadi basis, dengan LQ 0,773 pada 2025.

4.4.3 Kota Tanjungpinang

Di Tanjungpinang, industri pengolahan hanya memiliki LQ 0,164 pada 2021 dan 0,151 pada 2025. Basis kota ini pada 2025 terdiri atas administrasi pemerintahan (4,363), jasa lainnya (3,970), pendidikan (3,658), perdagangan (3,507), kesehatan (3,147), transportasi (2,992), real estat (2,821), konstruksi (1,360), informasi dan komunikasi (1,349), dan jasa keuangan (1,305). Susunan tersebut mencerminkan ciri kota yang bertumpu pada layanan pemerintahan dan jasa. LQ perdagangan sendiri berayun dari 3,435 pada 2021 ke 3,189 pada 2022, lalu kembali naik hingga 3,507 pada 2025.

4.4.4 Kabupaten Lingga

Basis terkuat Lingga adalah pertanian dengan LQ 8,098 pada 2025, naik dari 7,846 pada 2021. Sektor basis lainnya pada 2025 adalah pendidikan (5,633), administrasi pemerintahan (3,274), kesehatan (3,118), perdagangan (2,831), jasa lainnya (2,448), real estat (2,024), akomodasi dan makan minum (1,427), informasi dan komunikasi (1,331), dan konstruksi (1,002). Status konstruksi sebagai basis sangat tipis karena LQ-nya hanya 1,002. Industri pengolahan hampir tidak ada, dengan LQ 0,018 pada 2021 dan 0,016 pada 2025, sedangkan pertambangan belum menjadi basis (0,457).

4.4.5 Kabupaten Natuna

Hanya pertambangan dan pertanian yang menjadi basis di Natuna. LQ pertambangan naik dari 5,235 pada 2021 menjadi 6,936 pada 2024 dan sedikit turun ke 6,720 pada 2025, sedangkan LQ pertanian bergerak dari 3,974 menjadi 4,340. Industri pengolahan nyaris tidak memiliki porsi, dengan LQ 0,019 pada 2021 dan 0,018 pada 2025.

4.4.6 Kabupaten Kepulauan Anambas

Basis Anambas juga hanya pertambangan dan pertanian. LQ pertambangan naik dari 5,961 pada 2021 menjadi 7,969 pada 2024, lalu 7,568 pada 2025, dan LQ pertanian dari 1,943 menjadi 2,055. Industri

pengolahan nyaris tidak ada, dengan LQ 0,003 baik pada 2021 maupun 2025. Pola ini serupa dengan Natuna: satu sektor menentukan hampir seluruh perekonomian daerah.

4.5. Pembacaan gabungan: posisi pertumbuhan, perubahan struktur, dan spesialisasi

Tabel 10 menyandingkan hasil ketiga alat untuk setiap kabupaten/kota. Pembacaan gabungan ini memperlihatkan pola yang tidak terlihat bila tiap alat dibaca sendiri, dan tetap bersifat deskriptif tanpa klaim sebab-akibat.

Tabel 10. Pembacaan gabungan Tipologi Klassen, SCI, dan LQ per kabupaten/kota, 2021–2025

Daerah	Tipologi Klassen	SCI dan perubahan pangsa terbesar (poin)	Sektor basis menonjol 2025 (LQ)	Pembacaan gabungan
Bintan	Kuadran I (Ri 6,31%; Yi Rp98,36 juta)	7,76 (tertinggi). Industri pengolahan +4,84; pertambangan −3,15	Akomodasi dan makan minum 2,862; pertanian 2,083; industri pengolahan 1,071	Tumbuh cepat dengan perubahan struktur terbesar; industri pengolahan menjadi basis baru sejak 2022.
Batam	Kuadran I (Ri 6,42%; Yi Rp101,23 juta)	2,07 (di bawah provinsi). Konstruksi −0,92; industri pengolahan −0,72	Listrik dan gas 1,446; pengadaan air 1,397; industri pengolahan 1,371	Tumbuh cepat dengan struktur stabil yang sejak awal berbasis industri.
Karimun	Kuadran IV (Ri 4,83%; Yi Rp39,75 juta)	6,39. Industri pengolahan +2,74; pertambangan −2,58	Pertanian 5,394; jasa lainnya 4,585; pendidikan 2,675	Pertumbuhan dan pendapatan di bawah provinsi, struktur bergeser ke industri yang belum menjadi basis (LQ 0,381).
Tanjungpinang	Kuadran IV (Ri 3,34%; Yi Rp64,91 juta)	6,51. Konstruksi −5,37; perdagangan +3,27	Administrasi pemerintahan 4,363; jasa lainnya 3,970; pendidikan 3,658	Bergeser ke perdagangan dan jasa; basis pada layanan pemerintahan.
Lingga	Kuadran IV (Ri 3,59%; Yi Rp31,87 juta)	3,69 (sedikit di atas provinsi). Perdagangan +2,25; pertanian −1,72	Pertanian 8,098; pendidikan 5,633; administrasi pemerintahan 3,274	PDRB per kapita terendah; basis pertanian dengan pergeseran pelan ke perdagangan.
Natuna	Kuadran II (Ri 1,58%; Yi Rp175,33 juta)	0,96 (terendah). Konstruksi −0,53; perdagangan +0,43	Pertambangan 6,720; pertanian 4,340	Pendapatan tinggi, struktur nyaris tetap, bertumpu pada pertambangan (71,71% PDRB 2025).
Kepulauan Anambas	Kuadran II (Ri 2,12%; Yi Rp228,85 juta)	1,11. Pertambangan −0,77; perdagangan +0,57	Pertambangan 7,568; pertanian 2,055	Pendapatan tertinggi, struktur nyaris tetap, bertumpu pada pertambangan (80,76% PDRB 2025).

Sumber: Tabel 4, Tabel 5, Tabel 8, dan Tabel 9, diolah penulis dengan Microsoft Excel.

4.5.1. Pertumbuhan tinggi tidak selalu berarti perubahan struktur besar

Bintan dan Batam sama-sama berada di kuadran I, tetapi SCI Bintan 7,76 sedangkan Batam hanya 2,07, di bawah SCI provinsi sebesar 3,44. Pangsa industri pengolahan Batam hampir tidak berubah (58,23 persen menjadi 57,51 persen) karena sejak awal periode sudah menjadi basis (LQ 1,388), sementara Bintan beralih dari nonbasis (LQ 0,956) ke basis (LQ 1,071) dan menambah pangsa industri pengolahan sebesar 4,84 poin. Karimun menunjukkan arah lain: berada di kuadran IV dengan pertumbuhan di bawah provinsi, tetapi SCI-nya 6,39 menempati urutan ketiga tertinggi. Pergeseran ke industri tampak di Bintan dan Karimun, ke perdagangan dan jasa di Tanjungpinang dan Lingga, sedangkan Natuna dan Kepulauan Anambas bertahan pada sektor primer. Jalur primer–industri–jasa yang digambarkan Chenery dan Syrquin (1975) dengan demikian hanya tampak pada sebagian daerah, dan ini sejalan dengan Sen (2019) yang menekankan bahwa pola transformasi berbeda antarwilayah.

4.5.2 Spesialisasi pada satu sektor dan kerentanan

Natuna dan Kepulauan Anambas memiliki PDRB per kapita tertinggi (Rp175,33 juta dan Rp228,85 juta), tetapi pertambangan menguasai 71,71 persen dan 80,76 persen PDRB pada 2025, dengan LQ 6,720 dan 7,568. Nilai tambah pertambangan kedua daerah turun pada 2024 dan naik pada 2025, searah dengan kontraksi dan lonjakan pertumbuhan pada tahun yang sama (Tabel 2). Kesamaan arah ini menunjukkan bahwa naik turunnya ekonomi kedua daerah mengikuti satu sektor, sehingga ketergantungan sektor dapat dibaca sebagai sumber ayunan ekonomi yang lebar. Briguglio (1995) mengaitkan kerentanan wilayah kepulauan dengan ukuran kecil dan keterpencilan. Temuan di sini bukan bukti bahwa ketergantungan sektor menyebabkan kerentanan, melainkan gambaran bahwa struktur kedua daerah bertumpu pada satu sektor. Karena PDRB per kapita adalah rata-rata, angka yang tinggi juga tidak menunjukkan pemerataan pendapatan rumah tangga.

4.5.3 Tiga daerah di kuadran IV tidak seragam

Karimun, Tanjungpinang, dan Lingga sama-sama berada di bawah angka provinsi pada pertumbuhan dan PDRB per kapita, tetapi komposisi basisnya berbeda. Karimun bertumpu pada pertanian (LQ 5,394) dan berbagai jasa, dengan industri pengolahan yang pangsanya naik tetapi belum menjadi basis (LQ 0,381). Tanjungpinang bertumpu pada administrasi pemerintahan (LQ 4,363) dan perdagangan (LQ 3,507), sementara pangsa konstruksinya turun 5,37 poin. Lingga bertumpu pada pertanian (LQ 8,098), bergeser pelan ke perdagangan, dan memiliki PDRB per kapita terendah (Rp31,87 juta). Posisi yang sama pada Tipologi Klassen dengan demikian dapat menyembunyikan struktur dan arah perubahan yang berbeda, sehingga kuadran saja tidak cukup untuk menentukan sektor yang perlu diperhatikan.

Pembacaan gabungan memperlihatkan empat pola yang tidak terlihat bila tiap alat dibaca sendiri. Pola pertama adalah pertumbuhan cepat dengan transformasi besar dan basis industri yang baru terbentuk, yang hanya tampak di Bintan: kuadran I, SCI tertinggi (7,76), dan LQ industri pengolahan yang naik dari 0,956 menjadi 1,071. Pola kedua adalah pertumbuhan cepat dengan struktur yang stabil dan sudah berbasis industri sejak awal, yaitu Batam (kuadran I, SCI 2,07, LQ industri pengolahan 1,388 pada 2021 dan 1,371 pada 2025). Pola ketiga adalah pendapatan per kapita tinggi dengan struktur yang nyaris tetap dan bertumpu pada satu sektor, yaitu Natuna dan Kepulauan Anambas (kuadran II, SCI 0,96 dan 1,11, LQ pertambangan 6,720 dan 7,568). Pola keempat adalah daerah kuadran IV dengan arah perubahan yang berbeda, yaitu Karimun menuju industri tanpa menjadi basis, serta Tanjungpinang dan Lingga menuju perdagangan dan jasa. Dari tujuh daerah, hanya Bintan yang sekaligus tumbuh di atas provinsi, mengalami perubahan struktur besar, dan memperoleh status basis baru pada industri pengolahan.

SCI yang tinggi tidak selalu berarti perluasan sektor maju. Tanjungpinang memiliki SCI 6,51, tertinggi kedua setelah Bintan, tetapi berada di kuadran IV dengan Ri 3,34 persen. Perubahan strukturnya terutama berasal dari turunnya porsi konstruksi sebesar 5,37 poin, dan nilai konstruksi itu sendiri menyusut dari Rp4.401,93 miliar pada 2021 menjadi Rp4.273,78 miliar pada 2025, sehingga perubahan susunan sektor di kota ini sebagian mencerminkan menyusutnya satu sektor dan bukan semata meluasnya sektor lain. Karimun menunjukkan hal serupa dengan arah berbeda: SCI 6,39 dan porsi industri pengolahan naik 2,74 poin, tetapi LQ industri pengolahan 0,381 masih jauh di bawah 1, sehingga kenaikan porsi belum mengubah status basis. Dengan demikian, SCI perlu dibaca bersama

arah perubahan porsi sektor (Tabel 5) dan status basis (Tabel 7 dan Tabel 8) sebelum disimpulkan sebagai transformasi menuju sektor yang lebih maju. Temuan ini tetap bersifat deskriptif dan tidak menunjukkan penyebab.

5. Kesimpulan

Tujuh kabupaten/kota di Kepri berbeda dalam hal posisi pertumbuhan dan pendapatan, besar perubahan struktur, serta sektor basis selama 2021–2025. Menurut Tipologi Klassen, Bintan dan Batam berada di kuadran I, Natuna dan Kepulauan Anambas di kuadran II, serta Karimun, Lingga, dan Tanjungpinang di kuadran IV, sedangkan kuadran III tidak dihuni daerah mana pun.

Menurut SCI, perubahan struktur terbesar terjadi di Bintan (7,76), dengan porsi industri pengolahan naik dari 40,10 persen menjadi 44,94 persen. Tanjungpinang (6,51) dan Lingga (3,69) bergeser ke perdagangan dan jasa, Karimun (6,39) bergeser ke industri, Batam (2,07) tumbuh cepat tanpa banyak mengubah komposisinya, dan Natuna (0,96) serta Kepulauan Anambas (1,11) bertahan pada pertambangan.

Menurut LQ, industri pengolahan di Bintan menjadi basis sejak 2022 dan mencapai 1,071 pada 2025, sedangkan di Karimun LQ-nya naik tetapi masih di bawah 1. Natuna dan Kepulauan Anambas bertumpu pada pertambangan dengan LQ 6,720 dan 7,568 pada 2025. Seluruh temuan ini bersifat deskriptif dan tidak menunjukkan hubungan sebab-akibat.

Pembacaan gabungan menunjukkan bahwa posisi pertumbuhan, besarnya perubahan struktur, dan spesialisasi tidak bergerak seragam. Bintan dan Batam sama-sama tumbuh cepat, tetapi hanya Bintan yang mengubah susunan sektornya secara besar. Karimun, Tanjungpinang, dan Lingga sama-sama berada di kuadran IV dengan basis yang berbeda, sedangkan Natuna dan Kepulauan Anambas berpendapatan per kapita tinggi dengan struktur yang nyaris tetap dan bertumpu pada pertambangan. Dengan demikian, pertumbuhan yang tinggi tidak selalu disertai transformasi struktural yang besar.

Implikasi dan kontribusi. Kontribusi penelitian ini adalah peta posisi tujuh kabupaten/kota kepulauan di Kepri menurut tiga ukuran yang dibaca bersama, sehingga prioritas sektoral dapat dibedakan menurut kelompok daerah dan tidak disamaratakan pada tingkat provinsi. Bagi pembangunan ekonomi wilayah kepulauan, peta ini menunjukkan tiga situasi yang berbeda. Pertama, Bintan menjadi satu-satunya daerah yang industri pengolahannya menjadi basis baru (LQ 0,956 pada 2021 menjadi 1,071 pada 2025) pada periode yang sama dengan mulai berproduksinya KEK Galang Batang, tanpa menyatakan hubungan sebab-akibat; yang perlu dipantau adalah keterkaitan industri itu dengan perdagangan, akomodasi, dan jasa pendukung yang pangsanya ikut meningkat agar perubahan struktur tidak terbatas pada satu sektor. Kedua, Natuna dan Kepulauan Anambas bertumpu pada pertambangan (71,71 persen dan 80,76 persen PDRB) dengan LQ industri pengolahan hanya 0,018 dan 0,003, sehingga hilirisasi atau diversifikasi sektoral dapat menjadi bahan pertimbangan kebijakan, dengan catatan bahwa kerentanan dan keterbatasan konektivitas wilayah kepulauan (Briguglio, 1995; Teyansyah et al., 2026) memengaruhi kelayakannya. Ketiga, Karimun, Tanjungpinang, dan Lingga berada di kuadran IV dengan arah perubahan yang berbeda, sehingga arah kebijakan sebaiknya dikaitkan dengan sektor basis dan arah perubahan masing-masing, yaitu industri pengolahan yang pangsanya naik di Karimun, layanan pemerintahan dan perdagangan di Tanjungpinang, serta pertanian di Lingga. Batam, yang berbasis industri sejak awal periode, menjadi pembanding bagi daerah yang struktur ekonominya masih bergeser. Penelitian ini tidak menguji dampak hilirisasi terhadap pertumbuhan maupun struktur ekonomi, sehingga implikasi di atas bersifat deskriptif dan memerlukan kajian lanjutan, misalnya dengan data subsektor dan keterkaitan antarsektor, sebelum dijadikan rekomendasi kebijakan.

Limitasi dan studi lanjutan

Data sektoral sebelum 2021 tidak digunakan, sehingga tidak ada pembanding sebelum dan sesudah, dan 2021 masih berada pada masa pemulihan pandemi. Periode lima tahun itu pendek, dan SCI hanya membandingkan dua titik waktu. PDRB 17 lapangan usaha berhenti pada tingkat sektor, sehingga perubahan di dalam satu sektor tidak terlihat dan menjadi bahan studi subsektor. Total PDRB tujuh

kabupaten/kota berbeda dari PDRB provinsi yang dipublikasikan, sehingga LQ yang memakai provinsi sebagai acuan perlu dibaca bersama uji ketahanan pada bagian 3.5. Status basis pada LQ yang dekat dengan 1, misalnya konstruksi di Lingga (1,002) dan Bintan (1,041), mudah berubah oleh selisih data yang kecil. Hasil penelitian tidak menunjukkan sebab-akibat, termasuk antara aktivitas pengolahan bauksit dan perubahan struktur, dan pengaruh struktur ekonomi terhadap kemiskinan dan kesejahteraan tidak diuji. Studi lanjutan dapat memakai data subsektor, data panel dengan tahun sebelum 2021, pembobotan jumlah penduduk, acuan pembanding selain provinsi, serta indikator kemiskinan dan kesejahteraan.

Ucapan Terima kasih
Penulis berterima kasih kepada Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, serta semua pihak yang membantu penelitian ini.

Referensi

Agus, M. amalia M. (2021). Analisis Sektor Unggulan dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, *Vol 5 No 2*, 169–181.

Akita, T., & Alisjahbana, A. S. (2023). The Initial Impacts of the COVID-19 Pandemic on Regional Economies in Indonesia: Structural Changes and Regional Income Inequality. *Sustainability (Switzerland)*, *15*(18). https://doi.org/10.3390/su151813709

Ananta, P., Nairobi, Febrianto, I., & Rachman, A. A. (2024). *SEKTOR EKONOMI UNGGULAN, PROSEPEKTIF, DAN BERDAYA SAING DI KABUPATEN PRINGSEWU*. *1192*, 304–317.

Andriansyah, Nurwanda, A., & Rifai, B. (2023). Structural Change and Regional Economic Growth in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, *59*(1), 91–117. https://doi.org/10.1080/00074918.2021.1914320

Anggreani, M., Ratih, A., Husaini, M., Emalia, Z., Usman, M., Aida, N., & Ciptawaty, U. (2023). Analisis Pengaruh Sektor Pertaian Terhadap PDRB Sektor Pertanian di Indonesia Tahun 2015-2021. *Journal on Education*, *6*(1), 6490–6507. https://doi.org/10.31004/joe.v6i1.3871

Anshori, M. F., & Fahrati, E. (2025). Analisis Penentuan Sektor Basis dan Sektor Unggulan Sebagai Penggerak Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Tanah Laut. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, *8*(1), 140–152. https://doi.org/10.20527/jiep.v8i1.253

Augia, R., Endaryanto, T., & Rosanti, N. (2025). Economic Structure and Economic Shift Analysis of Food Crop Commodities in South Lampung Regency. *SEPA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, *22*(2), 274. https://doi.org/10.20961/sepa.v22i2.106172

Badan Pusat Statistik. (2026). *Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau (ribu rupiah)*. Retrieved https://kepri.bps.go.id/id/statistics-table/3/T1hBNVYwVjBjMU5oTTA5SFVuWjRVSGhuYUhsV1p6MDkjMyMyMTAw/produk-domestik-regional-bruto-per-kapita-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-kepulauan-riau--ribu-rupiah-.html?year=2025

Badan Pusat Statistik. (2026). *Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi (persen), 2025*. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/WnpCcmNtcE1ibkF5VjFSelJHMUVhRE52WjNWSVp6MDkjMw==/laju-pertumbuhan-produk-domestik-regional-bruto-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-provinsi--persen---2022.html?year=2025

Badan Pusat Statistik. (2026). *Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi (persen), 2025*. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/WnpCcmNtcE1ibkF5VjFSelJHMUVhRE52WjNWSVp6MDkjMyMwMDAw/laju-pertumbuhan-produk-domestik-regional-bruto-atas-dasar-harga-konstan-2010--menurut-provinsi--persen-.html?year=2025

Badan Pusat Statistik. (2026). *Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau (persen)*. https://kepri.bps.go.id/id/statistics-table/3/Tm10bFVGVklLMVF6UzBweFFuRm1XbWxaV0hCcVp6MDkjMw==/laju-pertumbuhan-produk-domestik-regional-bruto-per-kapita-atasdasar-harga-konstan-2010-

menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-kepulauan-riau--persen---2021.html?ye
Badan Pusat Statistik. (2026). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bintan Menurut Lapangan Usaha 2021-2025*. Perbedaan capaian ekonomi tersebut perlu dilihat bersama dengan karakteristik kegiatan produksi yang membentuk perekonomian masing-masing daerah. Natuna dan Kepulauan Anambas, misalnya, memiliki struktur ekonomi dengan kontribusi pertambangan yang besar,
Bank Indonesia. (2025). *Laporan Perekonomian Provinsi Maluku Utara Agustus 2025*. https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Maluku-Utara--Agustus-2025.aspx
Biro Umum Provinsi Kepulauan Riau. (n.d.). *Profil Provinsi Kepulauan Riau*. Retrieved https://biroumum.kepriprov.go.id/profil.phtml
Briguglio, L. (1995). Small island developing states and their economic vulnerabilities. *World Development*, *23*(9), 1615–1632. https://doi.org/10.1016/0305-750X(95)00065-K
Ciptawaty, U. (2021). Analisis Spasial pada Model Perekonomian Sumatera Bagian Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, *10*(2), 113–122. https://doi.org/10.23960/jep.v10i2.297
Dhora, S. T., Nairobi, N., & Taher, A. R. (2022). Specialization and Competitive Advantages of Leading Processing Industry in South Sumatra. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, *20*(1), 53–66. https://doi.org/10.29259/jep.v20i1.17744
Edgar M. Hoover, F. G. (2020). *An Introduction to Regional Economics*. https://researchrepository.wvu.edu/rri-web-book
Fabiany, N. F. (2021). Analisis Sektor Unggulan Perekonomian di Provinsi Jambi Tahun 2020 Nyanyu Fadilah Fabiany. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan (Mankeu)*, *10*(03), 619–632.
Hasna Tazkiya, N., Cahayu Baitunnisa, N., & Imani Hakam, L. (2025). Peran Transformasi Struktur Ekonomi Pada Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Analisis Literatur Sistematis. *Jurnal Ekonomi: Journal of Economic*, (2006), 132–138. https://doi.org/10.47007/jeko.v16i02.9195ThisisanopenaccessarticleundertheCCBYlicense%0A http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Eko
Hollis Chenery, M. S. (1975). Patterns of development. *Sustainable Development for Engineers: Hollis Chenery, M. S. (1975). Patterns of Development. Sustainable Development for Engineers: A Handbook and Resource Guide, 65–88. Https://Doi.Org/10.9774/Gleaf.978-1-907643-38-5_5A Handbook and Resource Guide*, 65–88. https://doi.org/10.9774/gleaf.978-1-907643-38-5_5
Hudani, M. M., Sobita, N. E., Purwaningsih, V. T., & Andrian, T. (2025). Evaluasi Dampak Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan*, *4*(1), 82–96. https://doi.org/10.55606/jimak.v4i1.5004
Ibal, L., & Murni. (2023). Analisis sektor unggulan ekonomi dan sektor potensial sebagai arah pembangunan pemekaran wilayah provinsi papua barat daya. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, *8*(2), 218–229.
Ika Wahyuntari, L., & Pujiati, A. (2018). Disparitas Pembangunan Wilayah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Economics Development Analysis Journal*, *5*(3), 296–305. https://doi.org/10.15294/edaj.v5i3.22153
Indah Triend Elisabeth, Muhammad Syukrin, S. (2025). POTENSI EKONOMI WILAYAH PERTUMBUHAN RENDAH DAN PENDAPATAN TINGGI DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, *5*(1), 53–62.
Junaedi, D., Zuhri, N. M., Febriani, D. A., Taggyah, I. K. F., Putri, D. U. Y., Widiyanto, K. S., & Jannah, L. (2026). Transformasi Struktural dalam Perekonomian Indonesia: Tinjauan Literatur terhadap Perkembangan Ekonomi Modern di Negara Berkembang. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, *5*(1), 5927–5934. https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.5823
Nabilla, N., Ciptawaty, U., Ratih Y. T., A., Yuliawan, D., & Murwiati, A. (2024). Analysis of Growth and Changes in Economic Structure in 5 Big Cities on the Island of Sumatra (Case Study 2017-2022). *International Journal of Economics, Management and Accounting (IJEMA)*, *2*(1), 55–68. https://doi.org/10.47353/ijema.v2i1.145
Novita, D., & Malau, A. G. (2025). Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Ternate. *Media Mahardika*, *24*(1), 42–55.
Pascal, E. (2023). Identification Of Leading Sectors In Batam: LQ, DLQ, and Shift-Share Analysis. *Jurnal Ekonomi*, *28*(2), 292–308. https://doi.org/10.24912/je.v28i2.1634

PEREKONOMIAN, K. K. B., & INDONESIA, R. (2022). *Presiden Joko Widodo Lepas Ekspor Perdana Tahun 2022 Smelter Grade Alumina di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang*. https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3605/presiden-joko-widodo-lepas-ekspor-perdana-tahun-2022-smelter-grade-alumina-di-kawasan-ekonomi-khusus-kek-galang-batang

Sandra, I. K., Varwasih, M. W., & Nofitasari, R. (2025). Analisis Sektor Unggulan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2023. *Mimbar Agribisnis : Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, *11*(2), 3083. https://doi.org/10.25157/ma.v11i2.18722

Sen, K. (2019). Structural transformation around the world: Patterns and drivers. *Asian Development Review*, *36*(2), 1–31. https://doi.org/10.1162/adev_a_00130

Syafina Putri Teyansyah, Enda Permana, & Wiku Larutama. (2026). Keterbatasan Indikator LPI dalam Menilai Kinerja Logistik Negara Kepulauan. *Jurnal Teknologi Dan Manajemen Industri Terapan*, *5*(2), 1248–1259. https://doi.org/10.55826/jtmit.v5i2.1857